



RENCANA KERJA TAHUN 2023



**BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

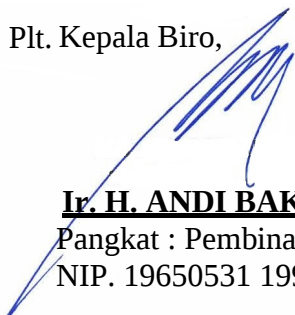
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat - Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan dalam rangka perbaikan terhadap penyusunan Rencana Kerja Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Makassar, April 2022

Plt. Kepala Biro,



Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, C.E.S.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19650531 199111 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2 Analis kinerja pelayanan perangkat daerah.....	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	25
BAB V. PENUTUP.....	28

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);

- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana kerja ini adalah :

1. Untuk menjabarkan Renstra Perangkat Daerah untuk pemenuhan target Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, dan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi;
3. Menyelaraskan rencana strategis daerah dengan Renja Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dibuatnya Renja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Sebagai pengendali kegiatan di Biro Pengadaan Barang/Jasa agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategis, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan.
2. Tercapaiannya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan indikator capaian.
4. Sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA tahun 2023.
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

21. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

22. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

23. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

24. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

25. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 31. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 32. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022

2.1.1 Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi referensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan Perencanaan Pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 yang meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan dengan baik dan telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Alokasi anggaran belanja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.603.303.064,00 dengan realisasi keuangan Rp. 3.262.326.165,00 atau 90,54% dan realisasi fisik 100% dengan jumlah 2 Program, 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaian kinerjanya memenuhi target, yaitu :

A. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 697.436.600,00 dengan realisasi Rp. 583.591.003,00 atau 83,68%.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran Rp. 453.296.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 370.405.007,00 atau sebesar 81,71%. Dengan capaian target sebesar 410 paket, dan 257 paket.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 489.167.400,00 dengan realisasi Rp. 426.174.648,00 atau 87,12%.
 - Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran Rp. 245.289.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 207.140.910,00 atau sebesar 84,45%. Dengan target 148 Orang dan terealisasi 48 Orang. Tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran.

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaian kinerjanya memenuhi target, yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 238.559.024,00 dengan realisasi Rp. 238.559.024,00 atau 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 195.981.024,00 dengan realisasi sebesar Rp. 195.981.024,00 atau sebesar 100%. Dengan capaian target sebesar 3 layanan umum kantor.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 284.926.000,00 dengan realisasi Rp. 250.605.415,00 atau 87,95%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran Rp. 276.746.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 242.655.415,00

atau sebesar 87,68%. Target sebesar 15 unit.

B. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 697.436.600,00 dengan realisasi Rp. 583.591.003,00 atau 83,68%.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran Rp. 129.374.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 111.006.476,00 atau sebesar 85,80%. Dengan capaian target sebesar 1 laporan, dan 6 Kab./Kota.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran Rp. 453.296.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 370.405.007,00 atau sebesar 81,71%. Dengan capaian target sebesar 2 produk, dan 75 Dokumen.
 - Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran Rp. 114.765.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 102.179.520,00 atau sebesar 89,03%. Dengan capaian target sebesar 12 laporan.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 692.759.000,00 dengan realisasi Rp. 649.785.040,00 atau 93,80%.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik, dengan alokasi anggaran Rp. 182.585.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 167.580.340,00 atau sebesar 91,78%. Dengan capaian target sebesar 4 laporan.
 - Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran Rp. 400.753.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 389.359.100,00 atau sebesar 97,16%. Dengan capaian target sebesar 6 Kab./Kota, 2 Aplikasi, dan 3 Kota.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran Rp. 109.419.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 92.845.600,00 atau sebesar 84,85%. Dengan capaian target sebesar 12 laporan.
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 489.167.400,00 dengan realisasi

Rp. 426.174.648,00 atau 87,12%.

- Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran Rp. 206.812.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 181.967.738,00 atau sebesar 87,99%. Dengan capaian target sebesar 4 laporan.
- Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran Rp. 245.289.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 207.140.910,00 atau sebesar 84,45%. Dengan capaian target sebesar 2 kali.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 37.416.340,00 dengan realisasi Rp. 37.416.340,00 atau 100%.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 37.416.340,00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.416.340,00 atau sebesar 100%. Target sebesar 2 dokumen namun yang tercapai 3 dokumen.
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.163.038.700,00 dengan realisasi Rp. 1.076.194.695,00 atau 92,53%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 5.565.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.565.000,00 atau sebesar 100%. Target sebesar 5 item namun yang tercapai 7 item.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 820.585.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 800.252.980,00 atau sebesar 97,52%. Target sebesar 7 item namun yang tercapai 9 item.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 336.888.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 270.376.715,00 atau sebesar 80,26%. Target sebesar 35 kali namun yang tercapai 40 kali.

- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 238.559.024,00 dengan realisasi Rp. 238.559.024,00 atau 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran Rp. 42.578.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.578.000,00 atau sebesar 100%. Target sebesar 250 surat namun yang tercapai 1090 surat.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 238.559.024,00 dengan realisasi Rp. 238.559.024,00 atau 100%.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran Rp. 8.180.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.950.000,00 atau sebesar 97,19%. Target sebesar 15 unit namun yang tercapai 29 unit.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah :

- a. Adanya refocusing anggaran untuk mengatasi pandemic Covid-19
- b. Adanya paket yang gagal tender/waktu untuk melaksanakan tender tidak cukup.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Adanya Jumlah target yang tinggi dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja sasaran dan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.

6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Hendaknya kegiatan yang tidak memenuhi target tetap diprioritaskan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;
- b. Perubahan target capaian kinerja di akhir periode Renstra;
- c. Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.

2.1.2 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk Triwulan I Tahun 2022

Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan untuk 2022 terdiri dari 5 (Lima) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan. Pada Triwulan I evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.218.749.051,- realisasi sebesar Rp. 65.536.704,- atau keuangan 2.04%.
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.883.779.200,- realisasi sebesar Rp. 74.071.300,- atau keuangan 3.93%.

Tabel T-C.29
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
 Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target	Rp		Target Renja Perangkat Daerah (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		Tingkat Realisasi	Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)			Target Capaian Rasionalisasi Target Renstra (%)	
						Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		Target
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4.01.4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	% Kesesuaian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Rencana	100%	2,162,945,168.00			100%	1,879,363,000.00	100%	1,659,550,691.00	0.88				
		% Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%			100%	100%								
4.01.4.01.07.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	947,110,072.00			100%	697,436,600.00	100%	583,591,003.00	0.84				
4.01.4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Jumlah Belanja Pengadaan yang dilaksanakan Secara Elektronik	100%	695,298,660.00			100%	692,759,000.00	100%	649,785,040.00	0.94				
4.01.4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	100%	520,536,436.00			100%	489,167,400.00	100%	426,174,648.00	0.87				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	1,198,278,416.00			100%	1,723,940,064.0	100%	1,602,775,474.0	0.93				
		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%			100%	100%								
4.01.01.1.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	2 Dokumen	14,725,000.00			2 Dokumen	37,416,340.00	3 Dokumen	37,416,340.00	1.00				
X.XX.01.1.06	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	583,773,000.00			100%	1,163,038,700.00	100%	1,076,194,695.00	0.93				
X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	314,854,416.00			100%	238,559,024.00	100%	238,559,024.00	1.00				
X.XX.01.1.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	284,926,000.00			100%	284,926,000.00	100%	250,605,415.00	0.88				

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Renstra Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan yaitu :

1. Persentase Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun 2021 telah mencapai 100%.
2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD pada tahun 2021 telah mencapai 100%.
3. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2021 telah mencapai 100%
4. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2021 telah mencapai 100%
5. Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2021 telah mencapai 100%.
6. Persentase Jumlah Belanja Pengadaan yang dilaksanakan Secara Elektronik pada tahun 2021 telah mencapai 100%.
7. Persentase Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2021 telah mencapai 100%.

Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran indikator kinerja dapat dilihat pada tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Restra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	% ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik			100	100	100	100	100	0	100	0	
	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	0	100	0	
	%Penyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD			100	100	100	100	100	0	100	0	
	%Administrasi Barang Milik Daerah pada PD			0	0	0	100	100	0	#DIV/0!	0	
	%Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	0	100	100	0	#DIV/0!	0	
	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	0	100	0	
	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	0	100	0	
	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	0	100	0	
2	%Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana			100	100	100	100	100	0	100	0	
	%Kepuasan Pengadaan Barang dan Jasa			100	100	100	100	100	0	100	0	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa			100	100	100	100	100	0	100	0	
	Presentase Jumlah Belanja Pengadaan yang dilakukan Secara Elektronik			100	100	100	100	100	0	100	0	
	Presentase Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa			100	100	100	100	100	0	100	0	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Secara umum kinerja pelayanan Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD. Namun demikian, masih terdapat isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan terkait kinerja pelayanan Perangkat Daerah yaitu :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Pengembangan Sistem Informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Pencapaian tingkat kematangan UKPBJ
- d. Pendampingan terhadap layanan hukum

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah:

- a. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia
- b. Perlunya Pengembangan Sistem Informasi
- c. Perlunya Peningkatan Kinerja dalam pencapaian kematangan UKPBJ
- d. Perlunya Tenaga Ahli di Bidang Hukum (Pengadaan Barang dan Jasa)

2.3.3 Dampak isu-isu strategis terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Capaian Program Nasional

Dampak yang ditimbulkan dari adanya isu-isu strategis Bidang Pengelolaan Layanan Secara Elektronik, yaitu kurang maksimalnya Kinerja Perangkat Daerah dalam mengelola data pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang dihadapi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat
3. Penguatan peran ASN dalam mendalami
4. Masih kurangnya SDM di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
5. Meningkatnya kebutuhan bandwidth terkait peningkatan kebutuhan akses system dan aplikasi untuk mempercepat pelayanan publik
6. Belum terintegrasinya Aplikasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan UKPBJ dalam pencapaian tingkat kematangan UKPBJ.

Sedangkan peluang yang bisa diambil Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Terlaksananya Bimtek OPD bidang Pengadaan Barang dan Jasa
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan publik
4. Terlaksananya Pendampingan Hukum bidang Pengadaan Barang dan Jasa
5. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
7. Komitmen semua unsur Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting / rekomendasi SDGs

Dari penjabaran isu – isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal –hal sebagai berikut sebagai alternatif /upaya pemecahan masalah, yaitu Perlunya peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dalam mengelola data pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan SDGs, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Kegiatan :

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan :

a) Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa

b) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

c) Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sub Kegiatan :

a) Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik

b) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

c) Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan :

a) Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa

b) Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa

c) Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan, di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 2 Program, 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Berdasarkan tabel T-C. 31 maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2023 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.713.978.416,00

B. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2023 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 6.797.698.343,00

Penjabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel T-C. 31 berikut ini:

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Kebutuhan
1	2	3	4		5	6	2	3	4		5	6
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA					8,511,676,760.08						11,934,930,760.08
4.01.4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Makassar	% Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana	%	100%	6,797,698,344.08	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Makassar	% Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana	%	100%	6,797,698,344.08
		Makassar	% Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%	100%			Makassar	% Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%	100%	
4.01.4.01.07.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100%	2,744,860,165.50	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100%	2,744,860,165.50
4.01.4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	503,836,188.00	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	503,836,188.00
4.01.4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	1,485,163,689.50	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	1,485,163,689.50
4.01.4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	755,860,288.00	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	755,860,288.00
4.01.4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Makassar	Persentase Jumlah Belanja Pengadaan yang dilaksanakan Secara Elektronik	%	100%	1,898,800,151.31	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Makassar	Persentase Jumlah Belanja Pengadaan yang dilaksanakan Secara Elektronik	%	100%	1,898,800,151.31
4.01.4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Makassar	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	4	699,299,887.77	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Makassar	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	4	699,299,887.77
4.01.4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	691,566,075.77	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	691,566,075.77
4.01.4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	507,934,187.77	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	507,934,187.77
4.01.4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	%	100%	2,154,038,027.27	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	%	100%	2,154,038,027.27
4.01.4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	40	884,399,863.77	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	40	884,399,863.77
4.01.4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	665,824,375.77	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	665,824,375.77
4.01.4.01.07.1.03.03	Pendampingan Konsultasi danatau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	603,813,787.73	Pendampingan Konsultasi danatau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	603,813,787.73

No.	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Kebutuhan
1	2	3	4		5	6	2	3	4		5	6
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100%	1,713,978,416.00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100%	5,137,232,416.00
		Makassar	Perangkat ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	%	100%			Makassar	Perangkat ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	%	100%	
		Makassar	Persentase penurunan tamuan berdasarkan LHP	%	100%			Makassar	Persentase penurunan tamuan berdasarkan LHP	%	100%	
4.01.01.1.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	%Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100%	37,925,000.00	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	%Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100%	37,925,000.00
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	14,725,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	14,725,000.00
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,000,000.00
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,600,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,600,000.00
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,000,000.00
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,600,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,600,000.00
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	5,000,000.00
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	5,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	5,000,000.00
4.01.01.1.03	KegiatanAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar		%	100%	15,000,000.00	KegiatanAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar		%	100%	15,000,000.00
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	5,000,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	5,000,000.00
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	5,000,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	5,000,000.00
4.01.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	5,000,000.00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	5,000,000.00

No.	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Kebutuhan
1	2	3	4		5	6	2	3	4		5	6
4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%	150,000,000.00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%	150,000,000.00
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	150,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	150,000,000.00
X.XX.01.1.06	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Makassar	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	853,773,000.00	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Makassar	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	853,773,000.00
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5,565,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5,565,000.00
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	25	28,250,000.00	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	25	28,250,000.00
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	4	819,958,000.00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	4	819,958,000.00
X.XX.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	0.00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	800,000,000.00
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	0.00	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	800,000,000.00
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0.00
X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0.00
X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0.00
X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	317,354,416.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	317,354,416.00
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	87,411,344.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	87,411,344.00
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	229,943,072.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	229,943,072.00
X.XX.01.1.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Makassar	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	339,926,000.00	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Makassar	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	2,963,180,000.00
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	326,746,000.00	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	450,000,000.00
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	13,180,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	13,180,000.00
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	2	0.00	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	2	2,500,000,000.00
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	0.00

No.	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Kebutuhan
1	2	3	4		5	6	2	3	4		5	6
X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0.00	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal usulan Program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2023 terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota, namun usulan tersebut tidak dalam kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

akan melanjutkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional untuk memantapkan pemulihan ekonomi dan system kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif. Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah “**Peningkatan Produktivitas untuk tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**”. RKP tahun 2022 mencakup 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 khususnya pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan. Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Karena merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan tujuan perangkat daerah sendiri yang terkait dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Adapun rumusan tujuan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulawesi Selatan pada Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023 yang ingin dicapai adalah:

“Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah”.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis, yang berfokus kepada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Sasaran yang dimaksud adalah:

“Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah”

Berdasarkan dari tujuan dan sasaran, output capaian kinerja yang ingin dicapai Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Persentase Kepuasan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 100%
 - Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana dengan jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 100%.
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik dengan jumlah capaian yang ingin di capai sebesar 100.
 - Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah dengan jumlah capaian yang ingin di capai sebesar 100%.

Tabel TC. 33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	9	10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3	4	5		6	7	9	10
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.4.01	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA					8,511,676,760.08			
4.01.4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	% Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana	Makassar	100%	%	6,797,698,344.08			
4.01.4.01.07.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	% Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Makassar	100%	%				
4.01.4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	100%	%	2,744,860,165.50			
4.01.4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	4	Laporan	503,836,188.00			
4.01.4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	12	Laporan	755,860,288.00			
4.01.4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Jumlah Belanja Pengadaan yang dilaksanakan Secara Elektronik	Makassar	100%	%	1,898,800,151.31			
4.01.4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Makassar	4	Laporan	699,299,887.77			
4.01.4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	2	Laporan	691,566,075.77			
4.01.4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	12	Laporan	507,934,187.77			
4.01.4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	100%	%	2,154,038,027.27			
4.01.4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	40	Orang	884,399,863.77			
4.01.4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	4	Dokumen	665,824,375.77			
4.01.4.01.07.1.03.03	Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Makassar	4	Dokumen	603,813,787.73			
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Makassar	100%	%	1,713,978,416.00			
		Perangkat ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	Makassar	100%	%				
		Persentase penurunan tamuuan berdasarkan LHP	Makassar	100%	%				
4.01.01.1.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Makassar	100%	%	37,925,000.00			
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	4	Dokumen	14,725,000.00			
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	1	Dokumen	3,000,000.00			
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	1	Dokumen	3,600,000.00			
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	1	Dokumen	3,000,000.00			
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	1	Dokumen	3,600,000.00			
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	4	Laporan	5,000,000.00			
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	4	Laporan	5,000,000.00			
4.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar	100%	%	15,000,000.00				
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	2	Dokumen	5,000,000.00			
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	2	Laporan	5,000,000.00			
4.01.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	2	Dokumen	5,000,000.00			
4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar	100%	%	150,000,000.00			
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Makassar	2	Paket	150,000,000.00			
X.XX.01.1.06	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	100%	%	853,773,000.00			
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar	2	Paket	5,565,000.00			
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	25	Paket	28,250,000.00			
X.XX.01.1.06.09	Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	4	Laporan	819,958,000.00			
X.XX.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	100%	%	0.00			
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Makassar	30	Unit	0.00			
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Makassar		Unit	0.00			
X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Makassar		Unit	0.00			
X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Makassar		Unit	0.00			
X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	100%	%	317,354,416.00			
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	4	Laporan	87,411,344.00			
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar	4	Laporan	229,943,072.00			
X.XX.01.1.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Makassar	100%	%	339,926,000.00			
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Makassar	15	Unit	326,746,000.00			
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Makassar	30	Unit	13,180,000.00			
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Makassar	2	Unit	0.00			
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar	2	Unit	0.00			
X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar		Unit	0.00			
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Makassar	1	Unit	311,277,772.00			
X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Makassar	59	Jenis	232,700,000.00			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan rencana program kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 guna mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah. Hasil rumusan tujuan, program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, ada beberapa program dan kegiatan yang mendukung Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa, kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, sub kegiatan :
 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sub kegiatan :
 - Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, sub kegiatan :
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pendampingan Konsultasi dan atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C. 33 dan T-B.56, yaitu sebagai berikut :

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 berisi rancangan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2023.

Pada bab penutup Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap program/kegiatan/sub Kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran Perangkat Daerah tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.